

**PERANAN ANALISIS DAYA DUKUNG WILAYAH DAN
PEMBAGIAN LOKASI PADA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KOTA PADANG PASCA GEMPA
30 SEPTEMBER 2009**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Jurusan Ilmu Sosial Politik Program Studi
Ilmu Administrasi Negara Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Administrasi Negara*



Oleh:
EVAN SUANDI
79287 / 2006
ILMU ADMINISTRASI NEGARA

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
PADANG
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Peranan Analisis Daya Dukung Wilayah dan Pembagian Lokasi
Pada Perencanaan Pembangunan Kota Padang Pasca Gempa
30 September 2009

Nama : Evan Suandi
Nim : 2006/79287
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 10 mei 2011

Disetujui oleh :

Pembimbing I



Drs. Ideal Putra, M.Si

NIP. 19630723 198602 1 001

Pembimbing II



Drs. Syamsir, M.Si

NIP. 19630401 198903 1 003

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Pengaji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Selasa, 10 Mei 2011 pukul 10.00 s/d 11.30 WIB

**Peranan Analisis Daya Dukung Wilayah dan Pembagian Lokasi pada
Perencanaan Pembangunan Kota Padang Pasca Gempa 30 September 2009**

Nama : Evan Suandi
Nim : 2006 / 79287
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 10 Mei 2011

Tim Pengaji :

	Nama
Ketua	: Drs. Ideal Putra, M.Si
Sekretaris	: Drs. Syamsir, M.Si
Anggota	: Drs. Nurman S, M.Si
Anggota	: Dra. Hj. Maria Montessori, M.Ed.M.Si

Tanda Tangan



ABSTRAK

EVAN SUANDI: NIM 2006179287. Peranan Analisis Daya Dukung Wilayah dan Pembagian Lokasi pada Perencanaan Pembangunan Kota Padang Pasca Gempa 30 September 2009

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan analisis daya dukung wilayah dalam perencanaan pembangunan Kota Padang pasca gempa 30 September 2009, serta untuk mengetahui apa saja yang dihadapi Kota Padang dalam melaksanakan pembangunan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pemanfaatan analisis daya dukung wilayah dan pembagian lokasi pada perencanaan pembangunan Kota Padang pasca gempa 30 September 2009. (2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam analisis daya dukung wilayah dan pembagian lokasi. (3) Upaya apa saja yang dilakukan terhadap hambatan dalam perencanaan pembangunan Kota Padang.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara maupun studi dokumentasi. Selanjutnya dari hasil penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis data dalam bentuk uraian deskriptif dengan kalimat yang jelas dan dapat di mengerti sesuai dengan tujuan penelitian model kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peranan analisis daya dukung wilayah dan pembagian lokasi pada perencanaan pembangunan Kota Padang pasca gempa 30 September 2009 sangat diperlukan untuk memberikan nilai tambah terhadap pembangunan Kota Padang secara keseluruhan, yang tercermin dari meningkatnya kesejahteraan penduduk dan menguatnya struktur ekonomi kota yang tergambar melalui produktivitas sektor-sektor unggulan (perdagangan, jasa dan pariwisata). Selain itu dimaksudkan untuk menciptakan struktur ruang kota yang memungkinkan berkembangnya aktivitas perkotaan secara efisien dan berkelanjutan sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan dan kesempatan usaha. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan adalah (1) faktor ekonomi, (2) faktor lingkungan, (3) sosial budaya, dan (4) geografis.

Terjadinya bencana gempa beberapa waktu yang lalu membuat tatanan Kota Padang menjadi rusak. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan analisis daya dukung wilayah dan pembagian lokasi dalam perencanaan pembangunan yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada, selain itu dengan latar belakang rawan bencana di wilayah Kota Padang hendaknya melakukan pembangunan berdasarkan mitigasi bencana.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, serta salawat beriring salam penulis ucapkan kepada nabi besar junjungan kita Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peranan Analisis Daya Dukung Wilayah dan Pembagian Lokasi pada Perencanaan Pembangunan Kota Padang Pasca Gempa 30 September 2009”**, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini banyak sekali pihak yang telah ikut serta memberikan bimbingan dan dukungan baik materi maupun moril, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengcapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Drs. Ideal Putra, M.Si selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak pengarahan, nasehat, bimbingan dan dorongan selama penulis menyusun skripsi ini.

4. Bapak Drs. Syamsir, M.Si selaku pembimbing II yang juga telah memberikan banyak pengarahan, nasehat, bimbingan dan dorongan selama penulis menyusun skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Tim Pengaji, yaitu: Bapak Drs. Nurman S, M.Si, dan Ibu Dra. Hj. Maria Montesori, M.Ed. M.Si yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Runi Hariantati, M.Hum sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Dosen-dosen yang ada di Jurusan ISP UNP, beserta Bapak dan Ibu karyawan Jurusan ISP UNP yang telah memberikan kemudahan serta pengetahuan kepada penulis selama penulis menjalani perkuliahan disini.
8. Bapak dan Ibu pegawai Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) dan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Padang yang telah membantu memberikan data penelitian.
9. Kepada Orang Tua dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.
Semoga bimbingan, petunjuk-petunjuk dan bantuan moril yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan diberi pahala oleh Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati mohon maaf atas segala kekurangan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dalam usaha peningkatan mutu pendidikan pada umumnya dan Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada khususnya.

Padang, Mei 2011

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Fokus Penelitian	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teoritis.....	8
1. Pengertian Peranan	8
2. Konsep Perencanaan	10
3. Pembangunan.....	11
4. Perencanaan Pembangunan.....	12
5. Analisis Daya Dukung dan Pembagian Lokasi dalam Perencaaan Pembangunan	18

6. Hambatan dan Upaya yang Harus Dilakukan dalam Perencanaan Pembangunan	26
--	----

B. Kerangka Konseptual	31
------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Informan Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	36
F. Teknik Pengujian Keabsahan Data	37
G. Teknik Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	40
1. Letak Geografis	40
2. Penduduk	43
3. Pendidikan	44
4. Pekerjaan	45
5. Pertumbuhan Ekonomi	46
B. Temus Khusus	48
1. Peranan Analisis Daya Dukung Wilayah dan Pembagian Lokasi pada Perencanaan Pembangunan Kota Padang Pasca Gempa 30 September 2009	48
2. Hambatan dalam Analisis Daya Dukung Wilayah dan Pembagian Lokasi	61

3. Upaya yang Dilakukan Terhadap Hambatan dalam Analisis Daya Dukung Wilayah dan Pembagian Lokasi	65
C. Pembahasan	66
1. Peranan Analisis Daya Dukung Wilayah dan Pembagian Lokasi pada Perencanaan Pembangunan Kota Padang Pasca Gempa 30 September 2009	66
2. Hambatan dalam Analisis Daya Dukung Wilayah dan Pembagian Lokasi	71
3. Upaya yang Dilakukan Terhadap Hambatan dalam Analisis Daya Dukung Wilayah dan Pembagian Lokasi	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	83

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Wilayah Administrasi dan Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Padang.....	41
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamiam dan Kecamatan di Kota Padang Pada Tahun 2007 – 2009 (dalam orang)	43
Tabel 4.3 Komposisi Penduduk Kota Padang berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2009	44
Tabel 4.4 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Pekerjaan tahun 2009.....	45
Tabel 4.5 PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2008	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Skema Analisis Daya Dukung.....	22
Gambar 2	Bagan Kerangka Konseptual	32
Gambar 3	Peta Kota Padang	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Penelitian

Lampiran 2 Surat Tugas Pembimbing Skripsi

Lampiran 3 Surat Rekomendasi Izin Penelitian

Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Padang yang merupakan ibu kota provinsi Sumatera Barat adalah pusat perekonomian, pendidikan, maupun pelabuhan bahkan juga pusat pariwisata. Keadaan geografis Kota Padang yang dilewati oleh garis khatulistiwa, menyebabkan Kota Padang mempunyai iklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Keadaan lingkungan yang sering mengalami bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan tanah longsor menjadikan pemerintah Kota Padang kesulitan dalam merencanakan pembangunan yang bekesinambungan.

Proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian dimana dalam hal ini mekanisme perencanaan menyangkut dengan prosedur perencanaan, instansi terlibat, jadwal pelaksanaan dan pejabat yang berwenang menetapkan dokumen perencanaan serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) kita untuk mencapainya untuk kemudian memilih arah-arah terbaik dan memilih langkah-langkah untuk mencapainya(Iwan Nugroho, 2004:25).

Hal demikian masih sangat dirasakannya “ego sektoral” antara para aparat Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. masing-masing dinas dan instansi cenderung mengatakan tugas dan fungsinya lah yang terpenting dalam kegiatan pembangunan tersebut menyebabkan koordinasi dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan menjadi sulit dilakukan.

Akibat selanjutnya adalah kurang optimalnya pelaksanaan proses pembangunan dan bahkan sasaran yang dituju dapat tidak terlaksana sama sekali.

Karena itu para birokrat perencana dan pengambil keputusan oleh pejabat politis tidak dapat terlepas diri dari kepentingan politik, karena perencana memiliki hubungan yang sangat dekat dengan lembaga dan individu yang bergerak berdasarkan kepentingan politik. Proses perencanaan telah bergeser dari sebuah proses rasional menjadi sebuah proses komunikatif, dimana setiap aktor berkomunikasi mengenai kepentingan, keberpihakan dan sikap yang diusung. Perencana harus berani untuk mengambil sikap dihadapan proses politik, tanpa harus terlibat dalam kepentingan praktis yang identik dengan dunia politik. (Cristian Bay dalam Hardiansyah, 2004:7).

Peran perencana pembangunan wilayah dan kota dimasa depan, tidak lagi sebagai pembuat dokumen dan berdiri di belakang meja, tetapi harus dapat berperan sebagai fasilitator, mediator sekaligus komunikator kepentingan-kepentingan yang terjadi. Kasus tuntutan FWK (Forum Warga Kota), pedagang, sopir angkot dan masyarakat lainnya serta rekomendasi pansus DPRD Kota Padang terhadap kebijakan dari perencanaan Pemko Padang merupakan sebuah kasus kontekstual.

Hal ini memperlihatkan peran aspek politis yang sangat besar dalam pembuatan keputusan yang dihasilkan oleh perencana. Itu lumrah dan seharusnya dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan sebuah kota dalam demokrasi yang mengedepankan akuntabilitas dan transparansi saat ini.

Berbicara masalah gempa, kata Mahyeldi Wakil Walikota Padang pada acara pembukaan forum SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kota Padang mengatakan bahwa ada beberapa fase yang telah dan akan dilakukan Pemko Padang. Untuk fase pemulihan dini telah dimulai sejak 1 November 2009 lalu dan dilanjutkan sampai saat ini, yaitu penyusunan dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi dengan prioritas penyusunan aksi, penyusunan rencana induk pemulihan Kota Padang pasca bencana dan evaluasi dokumen perencanaan yang ada.

Selain itu pemulihan dini aktifitas pemerintahan kota Padang, pemulihan dini sarana pendidikan, kesehatan insfrastruktur kota, aktifitas soial ekonomi masyarakat, dan pemulihan dini piskologi masyarakat dengan perioritas aksi melakukan terapi mental masyarakat, jelas Mahyeldi (2009).

Dengan terlaksananya fase-fase penanganan gempa tentu akan lebih mempercepat pemulihan kondisi kota pasca gempa. Kita berharap ke depan kondisi Padang akan semakin baik. Sebagai komitmen tetap kita ke depan akan melaksanakan visi kota yaitu, Menuju Metropolitan Yang Religious, Aman dan Sejahtera.

Selayaknya, momentum rekonstruksi Kota Padang pasca gempa menjadi ujian dan tantangan bagi perencana kota dan pengambil kebijakan di Pemko Padang dalam mencari dan merumuskan sebuah solusi yang elegan dan bermartabat bagi kemaslahatan masyarakat dan terselamatkannya wajah Kota Padang yang tertib, indah, dan kondusif. Hal ini tentu harus memperhatikan

berbagai faktor, baik faktor yang ada pada pemerintah, faktor yang ada pada masyarakat, serta faktor pada lingkungan Kota Padang sendiri.

Disadari bahwa berbagai macam usaha pembangunan kota telah dilaksanakan di kota Padang selama ini. Namun secara umum diketahui pula bahwa di balik hasil pembangunan fisik kota yang menunjang kesejahteraan masyarakatnya, tidak sedikit pula dampak pembangunan yang dirasa merugikan kehidupan (fisik dan psikis) masyarakat. diantaranya, pemindahan terminal regional bingkuang ke Aia Pacah, pengalihan fungsi terminal angkot pasar raya Padang menjadi pertokoan, pendirian plaza/mall dipusat kota, kiranya menjadi derita psikis ekonomi warga kota Padang yang akhirnya meledak pasca gempa.

Aspirasi yang berkembang ditengah masyarakat inipun ditanggapi dengan baik oleh DPRD dan masuk ke ranah politik. Menurut Zulkenedi Said (2009) Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar harus merelokasi setiap gedung perkantoran ke daerah yang masuk batas zona aman di kota Padang. Terutama gedung Pemerintahan yang ambruk dan rusak berat akibat gempa beberapa waktu lalu. Relokasi itu harus dilakukan mengingat potensi bencana kota Padang terbilang sangat tinggi, baik bencana gempa maupun tsunami.

Jika tetap dilakukan pembangunan gedung di lokasi yang rusak secara tidak langsung katanya akan mengulang kesalahan yang sama secara berulang-ulang. Apalagi jauh-jauh hari para ahli telah memperingatkan akan bahaya yang mengancam Kota Padang.

Menurutnya, Daerah zona aman itu diantaranya di sekitar kawasan Air pacah jika dikaitkan dengan masalah tanah, Bila perlu tanah masyarakat itu dibeli,

dan tidak salah nya kita mengalokasikan ke dalam APBD. Tentunya nanti di gabung dengan dana recoveri atau perbaikan dari pemerintah ujarnya.

Hal ini sangat menarik untuk dikaji, karena berkaitan dengan arah pembangunan Kota Padang setelah mengalami bencana alam gempa bumi pada tanggal 30 September 2009. Oleh sebab itu perlu adanya perencanaan pembangunan Kota Padang. Berdasarkan hal di atas penulis memberi judul penelitian ini **“Peranan Analisis Daya Dukung Wilayah dan Pembagian Lokasi Pada Perencanaan Pembangunan Kota Padang Pasca Gempa 30 September 2009”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mendapatkan beberapa identifikasi masalah yaitu:

1. Pembuat perencanaan pembangunan Kota Padang sangat dipengaruhi oleh faktor politik kekuasaan yang terjadi dalam masyarakat sehingga membuat perumusan peranan pembangunan Kota Padang pasca gempa tidak efektif.
2. Adanya ”ego sektoral” antara para aparatur pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, sehingga menyebabkan perencanaan pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya
3. Penyusunan Tata Ruang belum merata yang menyebabkan lambatnya sejumlah daerah untuk berkembang di berbagai bidang.

C. Pembatasan Masalah

Dari berbagai identifikasi masalah di atas penulis membatasi permasalahan penelitian pada bagaimanakah peranan analisis daya dukung wilayah dan pembagian lokasi pada perencanaan pembangunan Kota Padang pasca gempa 30 September 2009, indikator yang digunakan serta hambatan dan upaya dalam melakukan pembuatan perencanaan pembangunan tersebut.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemanfaatan analisis daya dukung wilayah dan pembagian lokasi pada perencanaan pembangunan Kota Padang pasca gempa 30 September 2009.
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam analisis daya dukung wilayah dan pembagian lokasi
3. Upaya apa saja yang dilakukan mengatasi hambatan dalam analisis daya dukung wilayah dan pembagian lokasi.

E. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terfokus dan dengan adanya keterbatasan objek pembahasan, maka yang akan kita lihat adalah bagaimanakah peranan analisis daya dukung wilayah dan pembagian lokasi dalam perencanaan pembangunan Kota Padang tersebut, indikator yang digunakan dan faktor penghambat serta upaya yang harus dilakukan dalam pembuatan perencanaan pembangunan di Kota Padang pasca gempa 30 September 2010.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui peranan analisis daya dukung wilayah dan pembagian lokasi dalam perencanaan pembangunan Kota Padang pasca gempa 30 September 2009.
2. Mengidentifikasi hambatan dalam analisis daya dukung wilayah dan pembagian lokasi.
3. Upaya yang dilakukan mengatasi hambatan-hambatan dalam analisis daya dukung wilayah dan pembagian lokasi.

G. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan hasilnya berguna sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep ilmu pengetahuan sosial khususnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Padang dalam pengambilan kebijakan untuk masa yang akan datang.
- c. Sebagai pijakan bagi peneliti lanjutan yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Peranan

Secara umum peranan (role) dapat diartikan sebagai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok sesuai dengan statusnya. Di dalam peranan terkandung beberapa hal yaitu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi dan sebagai individu yang sangat penting bagi struktur social serta meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan tempat seseorang atau kelompok dalam masyarakat.

Duverger (1982:45), Mengemukakan bahwa istilah peranan menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku di dalam masyarakat dimana dia hidup. Selanjutnya dijelaskan bahwa konsep peranan adalah untuk membuat garis batas antara masyarakat dan individu. Dalam batas peranan sosialnya, seseorang atau kelompok mempunyai batas kebebasan tertentu.

Selanjutnya Soekanto (1990:34), Mengemukakan bahwasannya peranan adalah sebagai dinamisasi dari status. Jika seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya mereka dinamakan menjalankan peranan. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Menurutnya peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Paling sedikit ada tiga hal yang mencakup spesialisasi dari peranan tersebut antara lain:

- a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam suatu lembaga
- b) Peranan adalah suatu konsep yang berhubungan dengan perihal apa yang dapat dilakukan oleh seseorang sebagai anggota masyarakat.
- c) Peranan juga diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Barlo dalam Effendi (1992:22), membedakan peranan kedalam empat macam pengertian:

- a) Rule prescription yaitu peranan secara tertulis yang harus dilakukan oleh seseorang yang menduduki jabatan tertentu dalam sistem sosial.
- b) Rule perception yaitu peranan seseorang terhadap sesuatu yang harus yang harus dilakukan berdasarkan peranan yang telah dirumuskan.
- c) Rule performance yaitu peranan yang didapat ditampilkan oleh seseorang sehubungan dengan kedudukan yang dimilikinya.
- d) Rule expectation yaitu peranan seseorang sesuai dengan kedudukannya yang diharapkan oleh pihak lain dalam upaya memperjuangkan suatu kepentingan.

Agar seseorang atau lembaga dapat berperan dengan baik dalam menunjang suatu kegiatan perlu adanya kesesuaian antara kesesuaian antara rule prescription dengan *rule perception* maupun *rule performance* serta *rule expectation*

2. Konsep Perencanaan

Pengertian perencanaan memiliki banyak makna sesuai dengan pandangan masing-masing ahli dan belum terdapat batasan yang dapat diterima secara umum. Beberapa batasan perencanaan menurut para ahli disajikan sebagai berikut:

1. Perencanaan adalah pemikiran rasional berdasarkan fakta-fakta dan atau perkiraan yang mendekat (estimate) sebagai persiapan untuk melaksanakan tindakan-tindakan kemudian (Abdulrachman, 1973:5).
2. Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penetuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan (Siagian, 1994:22).
3. Perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu (*Terry, dalam Kusmiadi, 1995:14*).
4. Perencanaan adalah proses dasar yang kita gunakan untuk memilih tujuan-tujuan dan menguraikan bagaimana cara pencapainnya (*Stoner and Wankel, dalam Kusmiadi, 1995:10*).
5. Menurut Soekartawi (2000: 8), Perencanaan adalah pemilihan alternatif atau pengalokasian berbagai sumber daya yang tersedia.

Dari pendapat para ahli di atas bisa diambil kesimpulan bahwa dengan adanya perencanaan maka akan dapat: (a) mendukung koordinasi antar pelaku

pembangunan (b) menjamin terciptanya, integrasi, sinkronisasi, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah (c) mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil.

3. Pembangunan

Pembangunan adalah upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan perubahan alternatif sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat yang lebih maju dan baik sesuai dengan pandangan masyarakat bangsa itu (Tjokroamidjojo, 1996:20).

Pembangunan mungkin menjadi hal yang menarik untuk diperdebatkan, Mungkin saja tidak ada satu pun disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan, namun ada tema-tema pokok yang menjadi pesan didalamnya. Dalam hal ini pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.

Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan pembangunan yang telah dibahas sebelumnya. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan.

Adapun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan,

dan adil. Tema ketiga mencapai aspirasi yang manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat (Iwan Nugroho, 2004:9).

4. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai upaya untuk menghubungkan kaidah-kaidah ilmiah kedalam praksis (praktik-praktik yang dilandasi teori) dalam perspektif orang banyak atau publik. Di dalam perencanaan pembangunan karena berlandaskan kaidah ilmiah, senantiasa diizinkan terjadi perubahan dalam rangka menuju atau mencapai cita-cita yang lebih baik. Adapun sasarnanya adalah tercapainya suatu kearifan dari hasil-hasil pemikiran yang dipengaruhi masyarakat.

Karena informasi membatasi kapasitas perencana dan stakeholder yang terkait, maka rasionalitas dari perencana dan stakeholder juga akan bersifat terbatas pula. Dengan demikian rasionalitas setiap orang tidak akan sama dan bersifat terbatas (*bounded rationality*) akibat perbedaan informasi yang dimilikinya. Dalam situasi yang sangat terbatas seperti ini melakukan perencanaan rasional akan sangat jauh di dalam menjawab permasalahan yang ada.

Karena informasi pada dasarnya tidak tersebar secara merata, konsentrasi informasi pada umumnya identik dengan konsentrasi kekuasaan (*power*). Kecenderungan mengedepankan rasionalitas pada akhirnya akan terjebak pada kecenderungan mengedepankan pihak yang memiliki informasi dan power yang pada akhirnya berarti menekankan pendekatan *top-down*.

Dalam kenyataannya, proses keputusan akhir di dalam proses perencanaan adalah proses politik, dan keputusan politik sangat ditentukan keseimbangan dan distribusi dari “power”. Di sisi lain, informasi sebenarnya tersebar beragam di masing-masing stakeholder dengan kepentingan yang berbeda-beda pula (Jhingan 2008:81).

Suatu perencanaan pembangunan yang ideal hendaknya memuat sifat-sifat perspektif, futuristik, dan antisipatif secara terintegrasi. Sifatnya yang lebih menyukai perspektif adalah implikasi dari landasan teori yang digunakan. Bila perencanaan pembangunan lebih bersifat deskriptif maupun eksplanatif akan menimbulkan hambatan dan keterbatasan dalam penerapan sehingga mengurangi keabsahannya. Sikap futuristik memuat pesan bahwa perencanaan mampu berhadapan dengan resiko-resiko dan ketidakpastian di masa yang akan datang.

Adapun sifat antisipatif lebih menunjukkan bahwa perencanaan harus mampu memfasilitasi dan menyelesaikan fenomena yang terjadi (Iwan Nugroho, 2004:8).

1. Ciri-ciri dan Tujuan Perencanaan Pembangunan

Ciri suatu perencanaan pembangunan yang bersifat usaha pencapaian tujuan-tujuan pembangunan biasanya berkait pula dengan peranan pemerintah sebagai pendorong pembangunan (agent of development).

Ciri-ciri dan tujuan perencanaan pembangunan menurut Tjokroamidjojo (1996:21) diuraikan sebagai berikut :

1. Suatu perencanaan pembangunan adalah usaha yang diceminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap (steady social economy growth). Hal ini dicerminkan oleh dalam usaha peningkatan produksi nasional, berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang positif.
2. Usaha yang dicerminkan dalam rencana meningkatkan pendapatan perkapita. Laju pertumbuhan ekonomi yang positif, yaitu setelah dikurangi dengan laju pertumbuhan penduduk menunjukkan pula kenaikan pendapatan per kapita.
3. Usaha mengadakan perubahan struktur ekonomi yang mendorong peningkatan struktur ekonomi agraris menuju struktur industri.
4. Adanya perluasan kesempatan kerja
5. Adanya pemerataan pembangunan yang meliputi pemerataan pendapatan dan pembangunan antara daerah.
6. Adanya usaha pembinaan lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan pembangunan.
7. Upaya membangun secara bertahap dengan berdasar kemampuan sendiri/nasional.
8. Usaha terus menerus menjaga stabilitas ekonomi.

Penyusunan perencanaan yang baik memerlukan penetapan dan analisis yang jelas dan konkret tentang tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Tujuan pembangunan merupakan hal yang sangat mendasar yang pada dasarnya diterjemahkan dari tujuan dibentuknya suatu negara ke

daerah. Karena tujuan pembangunan lebih bersifat prinsip dan sangat mendasar dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Agar menjadi lebih operasional, maka tujuan pembangunan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam prioritas pembangunan.

2. Unsur-unsur Pokok Dalam Perencanaan Pembangunan

Secara umum unsur-unsur pokok yang termasuk dalam perencanaan pembangunan Tjokroamidjojo (1996:25) sebagai berikut:

1. Kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan. Sering pula disebut sebagai tujuan, arah dan prioritas pembangunan. Pada unsur ini perlu ditetapkan tujuan-tujuan rencana (development objective/plan objective).
2. Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variable-variabel pembangunan dan implikasinya.
3. Perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan.
4. Adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi seperti kebijaksanaan fiscal, moneter, anggaran, harga, sektoral dan pembangunan daerah.
5. Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral seperti petanian, industri, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
6. Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Setiap perencanaan pembangunan mempunyai unsur dan komponen pokok yang selalu muncul pada setiap dokumen perencanaan pembangunan. Unsur-unsur pokok tersebut menggambarkan isi pokok dari

sebuah dokumen perencanaan pembangunan. Secara umum, unsur pokok tersebut meliputi visi dan misi pembangunan, prioritas, strategi pembangunan, kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan.

3. Proses dan Siklus Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berlangsung terus menerus dan saling berkaitan sehingga membentuk suatu siklus perencanaan pembangunan.

Proses dan siklus perencanaan pembangunan dimulai dari pengumpulan informasi perencanaan untuk dianalisis dan perumusan kebijaksanaan hingga kegiatan peramalan (forecasting) sebagai berikut :

1. Pengumpulan Informasi untuk Perencanaan (input untuk analisis dan perumusan kebijaksanaan).
2. Analisis Keadaan dan Identifikasi Masalah.
3. Penyusunan Kerangka Makro Perencanaan dan Perkiraan Sumber-Sumber Pembangunan.
4. Kebijaksanaan Dasar Pembangunan.
5. Perencanaan Sektoral, Kebijaksanaan Program, Proyek, Kegiatan lain.
6. Pererencanaan Regional (Konsiderasi regional dalam perencanaan sektoral).
7. Program Kerja, Program Pembiayaan, Prosedur Pelaksanaan, Penuangan dalam Perencanaan proyek-proyek.

8. Pelaksanaan Rencana: a. Pelaksanaan program/proyek, b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan lain, c. Badan-badan usaha.
9. Fungsi Pengaturan Pemerintah.
10. Kebijaksanaan-kebijaksanaan Stabilisasi (jangka pendek).
11. Komunikasi Pendukung Pembangunan.
12. Pengendalian Pelaksanaan.
13. Pengawasan.
14. Tinjauan pelaksanaan. ,
15. Peramalan (Forecasting).

Setelah kegiatan pembangunan selesai, badan perencana masih mempunyai tanggung jawab terakhir yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Disamping itu evaluasi juga mencakup faktor-faktor utama yang menyebabkan berhasilnya atau kendala yang menyebabkan kurang manfaat yang dapat dihasilkan oleh objek dan kegiatan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi ini sangat penting artinya sebagai masukan atau umpan balik (*feedback*) untuk penyusunan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang.

5. Analisis Daya Dukung dan Pembagian Lokasi dalam Perencanaan Pembangunan

Analisis daya dukung merupakan suatu alat perencanaan pembangunan yang memberikan gambaran mengenai hubungan antara penduduk, penggunaan lahan dan lingkungan. Dengan kata lain analisis daya dukung wilayah merupakan alat untuk analisis penggunaan tanah dan data populasi yang sistematis. Dengan cara ini kelangsungan hidup desa atau daerah-daerah dalam kaitan dengan ratio populasi atau tanah yang ditentukan. (Mc Call dalam Riyadi dan Dedy Supriadi Baratakusumah 2005: 178).

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa paling tidak ada dua variabel pokok yang harus diketahui secara pasti untuk melakukan analisis daya dukung yaitu potensi lahan yang tersedia, termasuk luas lahan, serta jumlah penduduk. Seluruh kegiatan manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup selalu membutuhkan ruang sehingga ketersediaan lahan sangat penting dan mempunyai pengaruh besar terhadap segala aktifitas manusia. Demikian juga besarnya jumlah penduduk dalam satu wilayah (ruang) akan sangat menentukan kemampuan wilayah tersebut untuk mendukung penduduknya, sehingga memperoleh suatu standar hidup yang layak.

Sebagai salah satu alat yang dapat digunakan dalam proses perencanaan pembangunan daerah/wilayah, analisis daya dukung (*Carrying Capacity Ratio, CCR*) dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh para perencana dalam menilai tingkat kemampuan lahan dalam mendukung segala aktifitas manusia yang ada dalam wilayah yang bersangkutan. Mengetahui

tingkat dukungan dari suatu area atau lahan sangat penting bagi seorang perencana pembangunan karena ia akan bisa memperkirakan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi atau memperkirakan tingkat kebutuhan penduduk yang disesuaikan dengan kondisi lahan yang ada.

Dengan demikian seorang perencana pembangunan tidak hanya sekedar mengetahui tingkat dukungan dari lahan semata tapi sekaligus juga bisa mengetahui dampak atau pengaruh yang mungkin ditimbulkan dari pemanfaatan suatu lahan. Selain itu, keseimbangan antara daya dukung suatu lahan dengan keberadaan penduduk juga bisa diperhitungkan, sehingga bisa diperkirakan daya serap potensi lahan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Dengan demikian dapat dijaga keseimbangan antara potensi alam atau lingkungan dan sumber daya manusianya.

Informasi yang dapat diperoleh dari hasil analisis daya dukung secara umum akan menyangkut masalah kemampuan (daya dukung) yang dimiliki oleh suatu daerah dalam mendukung proses pembangunan dan pengembangan daerah tersebut, dengan melihat perbandingan antara jumlah lahan yang dimiliki dan jumlah penduduk yang ada. Adapun manfaat analisis daya dukung antara lain adalah: (Riyadi dan Dedy Supriadi Baratakusumah 2005: 179).

1. Untuk mengetahui apakah suatu wilayah pertanian masih mampu mendukung kebutuhan pokok penduduk dengan melihat pertumbuhan penduduk tersebut.

2. Untuk memberikan informasi kepada perencana pembangunan atau pihak lain dalam rangka mengembangkan potensi penduduk dengan aktifitas lain, terutama apabila daya dukung lahan sudah mulai berkurang atau tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang ada.
3. Secara langsung maupun tidak, dapat digunakan sebagai bahan untuk mensosialisasikan dan mengembangkan tingkat kesadaran berbagai pihak mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan melalui sistem pemanfaatan lahan yang sesuai dengan peruntukannya.

Langkah-langkah yang dapat digunakan untuk melakukan analisis daya dukung pada dasarnya besifat fleksibel dan dinamis. Maksudnya ialah bahwa langkah-langkah yang dapat ditempuh sebenarnya cukup beragam, tergantung dari mana kita akan memulai. Dalam buku Riyadi dan Dedy Supriadi Baratakusumah (2005: 181) menyatakan langkah-langkah tersebut antara lain meliputi :

1. Identifikasi luas areal yang dapat digunakan untuk kegiatan pertanian.
2. Identifikasi frekuensi panen per hektar per tahun.
3. Tentukan jumlah keluarga dalam area tersebut.
4. Tentukan persentase jumlah petani yang ada pada daerah tersebut.
5. Tentukan ukuran lahan rata-rata yang dimiliki petani.
6. Hitunglah kemampuan daya dukung dengan menggunakan rumus CCR.

Selanjutnya cara sederhana untuk menghitung kemampuan daya dukung suatu daerah dapat menggunakan rumus matematik sebagai berikut:

$$\boxed{CCR = \frac{A \times r}{H \times h \times F}}$$

Keterangan :

CCR : Kemampuan daya dukung

A : Jumlah total area yang dapat digunakan untuk area pertanian.

r : Frekuensi panen per hektar per tahun

H : Jumlah KK / rumah tangga

h : Persentase jumlah petani yang tinggal di daerah tersebut

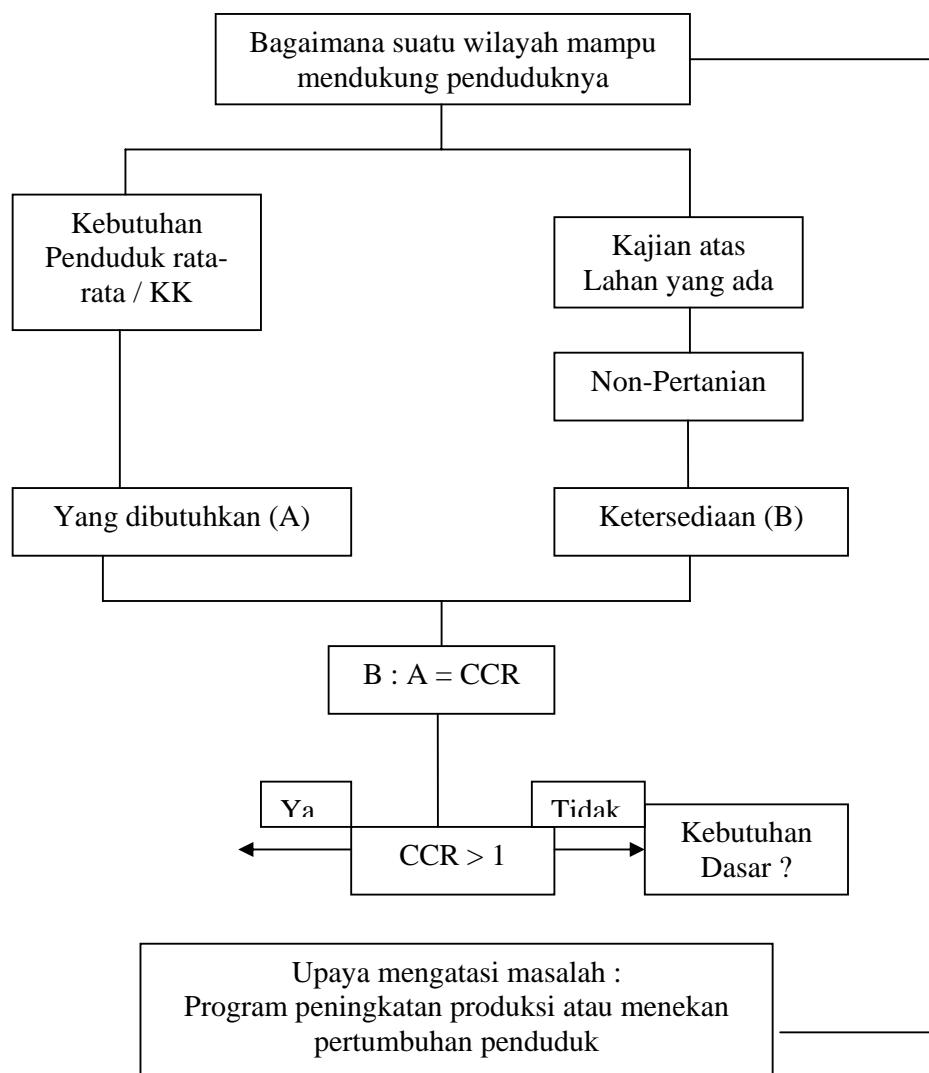
F : Ukuran lahan pertanian rata-rata yang dimiliki petani

Asumsi umum untuk menginterpretasikan hasil perhitungan analisis daya dukung tersebut, dapat terbagi dalam tiga bagian, yaitu :

1. Apabila $CCR > 1$, berarti bahwa dilihat berdasarkan kuantitas lahannya, suatu wilayah masih memiliki kemampuan untuk mendukung kebutuhan pokok penduduk dan masih mampu menerima tambahan penduduk. Pembangunan masih dimungkinkan bersifat ekspansif dan eksploratif.
2. Apabila $CCR < 1$, berarti berdasarkan jumlah lahan yang ada, di wilayah tersebut sudah tidak mungkin lagi dilakukan pembangunan yang bersifat ekspansif dan eksploratif lahan. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok penduduk menjadi berkurang, sehingga perlu dilakukan program peningkatan produktivitas, intensifikasi dan ekstensifikasi melalui perbaikan teknologi atau menekan pertumbuhan penduduk.
3. Apabila $CCR = 1$, berarti bahwa daerah tersebut masih memiliki keseimbangan antara kemampuan lahan dan jumlah penduduk.

Pemenuhan kebutuhan pokok pun masih dapat di atasi. Namun kondisi seperti ini harus diwaspadai oleh pemerintah daerah karena proses pembangunan yang cepat dan pertumbuhan penduduk yang kurang terkendali dapat dengan cepat menyebabkan menurunkan kemampuan daya dukung lahan di daerah tersebut.

SKEMA ANALISIS DAYA DUKUNG



Analisis pembagian lokasi (Location Quotient Analysis LQA) dimaksudkan untuk mengetahui gambaran umum mengenai kemampuan sektor-sektor pembangunan di suatu wilayah dalam mendukung proses pembangunan daerahnya. Analisis pembagian lokasi merupakan metode yang membandingkan kemampuan sektor-sektor pembangunan dalam suatu daerah atau wilayah dengan kondisi sektor-sektor pembangunan yang ada di daerah yang lebih luas.

Dalam proses analisis pembagian lokasi biasanya digunakan sebagai bagian dari teknik spatial planning. Dalam kesempatan ini penulis menggabungkannya dengan analisis daya dukung dengan maksud untuk lebih mendekatkan teknik-teknik analisis yang dipandang memiliki kesamaan atau hampir sama dalam proses, fungsi dan peranannya terhadap proses perencanaan pembangunan.

Untuk menerapkan teknik LQA digunakan rumus matematis sederhana sebagai berikut :

$$Lqi = \frac{Si / Ni}{S / N} \text{ atau } \frac{Si / S}{Ni / N}$$

Keterangan :

- Si : Jumlah tenaga sektor “i” di kabupaten/Kota
- S : Jumlah tenaga kerja keseluruhan di kabupaten/Kota
- Ni : Jumlah tenaga kerja sektor “i” di Propinsi
- N : Jumlah tenaga kerja keseluruhan di Propinsi.

Asumsi umum untuk menginterpretasikan hasil perhitungan analisis pembagian lokasi tersebut, dapat terbagi dalam tiga bagian, yaitu:

LQ > 1, menunjukan kegiatan dalam sektor tersebut dilihat dari jumlah tenaga kerjanya memiliki potensi ekspor karena dipandang mampu mengembangkan hasil produksinya.

LQ < 1, kecenderungan pada sektor tersebut di kabupaten X memerlukan impor dari kabupaten lain.

LQ = 1, menunjukan adanya keseimbangan antara kebutuhan dan besarnya produk yang dihasilkan dalam sektor terkait

a. Rekontruksi dan rekoveri

1) Rekonstruksi

Tahap rekonstruksi yaitu tahap pemulihan, dimana dalam tahap rekonstruksi perencana pembangunan berusaha untuk melakukan perbaikan infrastruktur bangunan baik fisik maupun sarana dan prasarana yang terkena dampak langsung dari bencana yang terjadi, rekonstruksi juga merupakan tahap penanganan pertama sebelum dilakukan penanganan selanjutnya

2) Rekoveri

Yaitu tahap penanganan gempa selanjutnya apabila tahap rekonstruksi telah selesai dilaksanakan. Dimana dalam tahap rekoveri membutuhkan perencanaan yang lebih terkonsep secara matang, dalam tahap rekoveri pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus berusaha memikirkan langkah-langkah kedepannya seperti rekolasi bangunan, gedung perkantoran dan perumahan penduduk harus lebih dipertimbangkan lagi dari berbagai aspek kehidupan sehingga masyarakat

tidak dirugikan sehingga pembangunan dalam berbagai bidang dapat terlaksana, tetapi jauh lebih penting mewujudkan kesiapsiagaan individu, kelompok masyarakat/komunitas untuk mencegah, menangani, dan merehabilitasi akibat kejadian bencana karena pada dasarnya program pembangunan pasca bencana adalah untuk masyarakat.

b. Indikator yang mempengaruhi

1) Aspek ekonomi

Mengacu pada pembiayaan dalam sebuah perencanaan pembangunan seperti tersedianya anggaran, karena bagaimanapun aspek ekonomi merupakan salah satu aspek terpenting dalam pelaksanaan pembangunan karena terbengkalainya pembangunan yang ada pada saat sekarang ini sering disebabkan karena terbatasnya anggaran.

2) Aspek Sosial

Kota ditinjau dari aspek sosial merupakan konsentrasi penduduk yang membentuk suatu komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas melalui konsentrasi dan spesialisasi tenaga kerja. Bercampurnya penduduk dengan berbagai latar belakang, sejarah, dan kebudayaan menghasilkan pengaruh-pengaruh yang perlu dipertimbangkan.

3) Fisik Prasarana

Agar perencanaaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien fisik dan prasarana yang tersedia perlu ditinjau terlebih dahulu seperti: keadaaan jalan, jembatan dan bangunan. Hal ini agar

perencanaan tersebut sesuai permasalahan dan kondisi lingkungan yang ada. Kota ditinjau dari aspek fisik merupakan kawasan terbangun yang terletak saling berdekatan dan terkonsentrasi yang meluas dari pusat hingga kedaerah pinggiran.

4) Tata Ruang

Merupakan wujud struktural dari pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Tata ruang secara umum adalah suatu proses yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, atau pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pelaksanaan serta pemanfaatan ruang yang harus terkait satu sama lain. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

6. Hambatan dan upaya yang harus dilakukan dalam perencanaan pembangunan

a. Hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan

Adapun hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan menurut Melville c branch(1995:37)adalah:

1) Faktor ekonomi

Kota yang memiliki fungsi jamak secara ekonomis lebih kuat dan lebih sulit terkena pengaruh. Hal tersebut disebabkan karena berbagai akibat perkembangan yang tidak diinginkan pada salah satu fungsi tidak akan begitu parah jika kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya tidak terpengaruh. Faktor inilah yang menyebabkan

sebagian besar kota-kota berupaya untuk melakukan diversifikasi basis ekonominya. Adapun pengaruh suatu hal yang tidak diinginkan yang terjadi di tempat yang cukup jauh, terhadap salah satu dari beberapa kegiatan produktif secara ekonomis tidak terlalu menimbulkan gangguan sebagaimana terjadi pada kota berfungsi tunggal.

2) Faktor lingkungan

Masalah lingkungan hidup di perkotaan merupakan masalah yang kompleks. Aktifitas kota telah menimbulkan berbagai masalah lingkungan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, khususnya di kota-kota besar maka ekosistem udara dewasa ini berubah. Berbagai implikasi pada garis besarnya menyangkut industrialisasi, mobilisasi manusia yang terus meningkat, dan diskonkurensi masalah kependudukan terhadap daya dukung yang makin melebar.

3) Faktor sosial budaya

Kepercayaan dan sikap masyarakat yang telah mengakar jauh sejak beberapa waktu yang lampau. Pengaruh kebudayaan yang eluas sepanjang sejarah terlihat di dalam jumlah dan kualitas kegiatan perkotaan yang juga mempengaruhi karakter fisik dan sifat-sifat kemasyarakatan kota. Bercampurnya penduduk dengan berbagai latar belakang sejarah etnologi dan kebudayaan menghasilkan

gabungan pengaruh-pengaruh yang serasi yang perlu dipertimbangkan di dalam perencanaan kota secara komprehensif.

4) Faktor geografis

Keadaan geografis sebuah kota bukan hanya merupakan pertimbangan yang esensial pada awal penentuan lokasinya, tetapi mempengaruhi fungsi dan bentuk fisiknya. Maksud dibangunnya suatu kota dapat berubah dari yang telah ditetapkan semula. Suatu kota sangat dipengaruhi oleh fungsi-fungsi dasarnya dan besarnya pengaruh tergantung dari sifat dan banyaknya fungsi.

b. Upaya yang harus dilakukan pemerintah

Menurut lembaga Administrasi Negara (2007) upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam perencanaan pembangunan adalah:

1) Membuat rencana strategis pembangunan daerah

Yang pertama kali perlu dibuat dalam rangka penyusunan rencana strategis adalah membuat visi dan misi daerah dalam upaya untuk mengembangkan otonomi daerah dengan menggunakan metoda strength-weaknes-opportunity-threat atau SWOT. Metoda ini berguna untuk mengetahui kedudukan sesuatu organisasi atau daerah dalam lingkungan pesaing-pesaingnya, dengan melihat kemampuan dan kelemahannya sendiri, untuk menggunakannya tentu diperlukan adanya bantuan dari tenaga ahli. Cara yang lebih mutakhir dalam membuat visi dan misi daerah adalah dengan menggunakan proses

demokrasi, yaitu dengan melibatkan komponen-komponen masyarakat dan swasta atau pemangku kepentingan.

2) Penciptaan lapangan kerja

Prioritas utama bagi strategi program pembangunan daerah dan pengembangan ekonomi daerah seharusnya diletakkan pada penciptaan lapangan kerja. Bila semua orang bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri maka mereka akan dapat membeli semua kebutuhan dengan penghasilan tersebut, karena beban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum selama ini semakin berat karena semakin banyak orang yang tidak mempunyai pekerjaan.

3) Reformasi peraturan perundang-undangan

Evaluasi dan reformasi peraturan-peraturan yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan perlindungan sosial. Salah satu diantaranya adalah peraturan perundangan yang mengatur pembentukan usaha baru dan penggunaan tanah, prosedur yang berbelit-belit mengenai pembentukan dan pendaftaran perusahaan, peraturan penggunaan tanah yang melarang operasi bisnis di kawasan perumahan, tindakan penertiban oleh aparat pemerintah daerah, berbagai izin yang diperlukan dan keharusan untuk melaporkan kegiatan, semua memberikan beban berat kepada sektor informal maupun formal salah satu penyebab mengapa sektor informal tetap informal adalah karena para pengusaha sektor

informal tidak mampu untuk membiayai dokumen untuk merubah usaha mereka menjadi legal atau formal.

4) Berusaha menciptakan iklim kerja yang kondusif

Pemerintah derah perlu berfikir realistik yaitu dengan menentukan terlebih dahulu bagi siapa iklim kerja yang kondusif akan diadakan tentu ini akan sangat terkait dengan strategi yang akan diadakan, iklim usaha bagi usaha kecil misalnya tentu tidak akan sama dengan usaha besar.

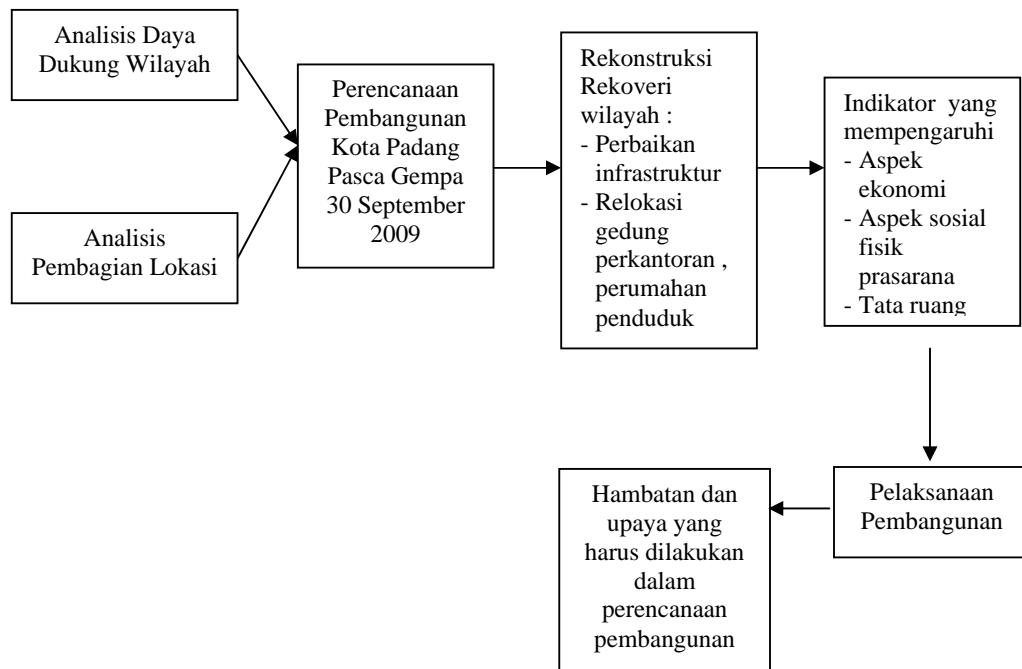
5) Merangsang pertumbuhan usaha kecil dan menengah

Ekonomi dunia pada saat ini sangat terkait dengan perkembangan usaha kecil dan menengah, menariknya satu atau dua dekade terakhir ini telah menunjukkan betapa usaha kecil dan menengah telah menciptakan begitu banyak lapangan kerja, hal ini yang harus berusaha dirangsang oleh pemerintah dimana kuncinya adalah keterkaitan antara usaha besar dan usaha kecil menengah, dimana usaha kecil dan menengah memasok komponen bagi kegiatan produksi, usaha besar yang telah mempunyai pasar ekspor, namun kemitraan tersebut sebenarnya juga membantu perusahaan besar dalam memperoleh bahan baku yang lebih murah dengan mutu yang tidak berkurang.

B. Kerangka Konseptual

Pasca gempa 30 September 2009 Kota Padang memerlukan perencanaan pembangunan yang dilihat dari gambaran hubungan antara penduduk penggunaan lahan dan lingkungan serta alat perencanaan pembangunan yang dapat mengetahui gambaran umum mengenai sektor-sektor pembangunan Kota Padang dalam mendukung proses pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan analisis daya dukung wilayah dan pembagian lokasi pada perencanaan pembangunan Kota Padang pasca gempa 30 September 2009 yang berkaitan dengan penggunaan tanah, data populasi yang sistematis dan membandingkan sektor-sektor pembangunan di daerah Kota Padang dengan daerah lain yang lebih luas. Alat perencanaan pembangunan seperti ini di sebut dengan analisis daya dukung wilayah dan pembagian lokasi

Penggabungan antara analisis daya dukung wilayah dan pembagian lokasi dimaksudkan untuk lebih mendekatkan teknik teknik analisis yang dipandang memiliki kesamaan atau hampir sama dalam proses fungsi dan peranannya terhadap proses perencanaan pembangunan, yang meliputi rekonstruksi dan rekoveri wilayah serta indikator yang digunakan dalam perencanaan pembangunan serta mendapatkan hasil berupa hambatan dalam perencanaan pembangunan dari faktor lingkungan,sosial budaya, geografis dan ekonomi. Untuk lebih jelasnya kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada BAB IV tentang peranan analisis daya dukung wilayah dan pembagian lokasi pada perencanaan pembangunan Kota Padang pasaca gempa 30 september 2009. Terjadinya bencana gempa beberapa waktu yang lalu membuat tata ruang Kota Padang menjadi berantakan.

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan analisis daya dukung wilayah dan pembagian lokasi dalam perencanaan pembangunan yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap pembangunan kota secara keseluruhan, yang tercermin dari meningkatnya kesejahteraan penduduk dan menguatnya struktur ekonomi kota.

Pengembangan pola ruang kota tersebut tergambar melalui pengalokasian ruang untuk meningkatkan produktivitas sector-sektor unggulan (perdagangan, jasa, dan pariwisata serta industri) dan di dukung oleh penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan modern. Selain itu juga di maksudkan untuk menciptakan struktur ruang kota yang memungkinkan berkembangnya aktivitas perkotaan secara efisien dan berkelanjutan sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan dan kesempatan usaha yang adil dan merata.

Berdasarkan analisis daya dukung wilayah pemerintah melakukan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah kota Padang dengan melakukan pembagian lokasi berdasarkan kemampuan lahannya untuk mendukung perencanaan pembangunan, memperhatikan karakteristik dan prioritas pengembangan Kota Padang.

Adapun yang menjadi hambatan dalam perencanaan pembangunan tersebut adalah:

1. Faktor ekonomi yaitu masalah ketersediaan anggaran, sehingga menyulitkan pemerintah dalam membuat master plan, detail engineering desain dan pembebasan lahan.
2. Faktor lingkungan yaitu meningkatnya pertumbuhan penduduk secara signifikan dan tecemarnya ekosistem udara akibat tidak mampunya perusahaan-perusahaan mengelola limbah hasil industrinya.
3. Faktor sosial budaya yaitu bercampurnya penduduk dengan berbagai latar belakang sosial sejarah etnografi membuat Kota Padang kesulitan dalam melakukan perencanaan yang komprehensif.
4. Faktor geografis yaitu dengan latar belakang rawan bencana Kota Padang kesulitan dalam melakukan perencanaan pembangunan untuk itu pembangunan yang akan dilakukan haruslah berdasarkan mitigasi bencana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tentang peranan analisis daya dukung wilayah dan pembagian lokasi pada perencanaan pembangunan Kota Padang pasca gempa 30 September 2009 maka saran yang akan penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Padang hendaknya segera melakukan perencanaan pembangunan berdasarkan analisis daya dukung wilayah dan pembagian lokasi sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang 2010-2030
2. Dengan latar belakang kerawanan bencana di wilayah Kota Padang pemerintah hendaknya melakukan pembangunan berdasarkan mitigasi bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman, 1973. *Kerangka Pokok-Pokok Management Umum*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru-Van Koeve.
- Dadang, Solihin. 2008. "KONSEP DASAR PERENCANAAN", Makalah disampaikan Pelatihan Fungsional Penjenjangan Perencana Pertama Angkatan XIV. Jakarta 26 Mei 2008.
- Duverger Maurice. 1982. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali
- Hamid, Hasani. 2008. *Dimana Ibukota Kabupaten Kerinci*. Jakarta.
- Hardiansyah. 2004. *Kebijakan Publik, Dimensi Kekuasaan dan Politik Perencanaan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Jhingan, ML. 2008. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kusmiadi, H.R. 1995. *Teori dan Teknik Perencanaan*. Bandung: Ilham Jaya Bandung.
- Muhammad, Nasir. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja. Bandung: Rosdakarya.
- Melville C Branch. 1995. *Perencanaan Kota Komprehensif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, Iwan 2004. *Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Riyadi, Dedy Supriadi Baratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Siagian, S P. 1994. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Soekanto Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekartawi, 1990. *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan Dengan Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: CV. Rajawali.